



>> **LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA BEKASI  
2024**



Telp/Fax. 021.89456740  
<https://satpolpp.bekasikota.go.id/>  
Jl. Pangeran Jayakarta No. 1 Harapan Mulya  
Medan Satria

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi .....	6
1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis.....	8
A. Aspek Strategis Organisasi.....	8
B. Isu Strategis.....	9
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi .....	10
1.5. Sistematika Penyajian .....	15
BAB II Perencanaan Kinerja.....	17
2.1. Rencana Strategis .....	17
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	18
2.1.2. Indikator Kinerja Utama .....	20
2.2. Perjanjian Kinerja .....	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	31
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	32
3.3. Realisasi Anggaran .....	73
BAB IV Penutup .....	80
4.1. Kesimpulan .....	80
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	12
Tabel 1.4.2	Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 .....	13
Tabel 2.1.1	Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi .....	18
Tabel 2.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	20
Tabel 2.1.3	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	21
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024.....	24
Tabel 2.2.2	Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024.....	24
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024.....	32
Tabel 3.2.1	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban.....	33
Tabel 3.2.2	Jumlah Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban.....	34
Tabel 3.2.3	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada.....	36
Tabel 3.2.4	Analisis Capaian Nilai Indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada Dengan Tahun Sebelumnya.....	37
Tabel 3.2.5	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026.....	37
Tabel 3.2.6	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban .....	38
Tabel 3.2.7	Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada .....	45
Tabel 3.2.8	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2024.....	46
Tabel 3.2.9	Rincian Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024.....	47
Tabel 3.2.10	Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024.....	48
Tabel 3.2.11	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP.....	49
Tabel 3.2.12	Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai AKIP Dengan Tahun Sebelumnya .....	49

Tabel 3.2.13	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026.....	50
Tabel 3.2.14	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama pencapaian Nilai AKIP.....	51
Tabel 3.2.15	Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis pencapaian Nilai AKIP.....	56
Tabel 3.2.16	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2024.....	58
Tabel 3.2.17	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi .....	59
Tabel 3.2.18	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi .....	60
Tabel 3.2.19	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	60
Tabel 3.2.20	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban PMKS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	61
Tabel 3.2.21	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh anggota Satlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	61
Tabel 3.2.22	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh Anggota Satlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	62
Tabel 3.2.23	Hasil Analisis perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi .....	63
Tabel 3.2.24	Perbandingan Hasil Penilaian Komponen SKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 .....	64
Tabel 3.2.25	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai IKM.....	65
Tabel 3.2.26	Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai IKM Dengan Tahun Sebelumnya.....	66
Tabel 3.2.27	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai IKM Terhadap Target .....	66
Tabel 3.2.28	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada.....	67
Tabel 3.2.29	Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada.....	73
Tabel 3.3.1	Program, Kegiatan dan Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabatnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Penerapan manajemen strategis di Indonesia pada sektor publik, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan di dalam Renstra organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pasal 2 Ayat (1) mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diuraikan bahwa Laporan kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan dan menyampaikannya kepada Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian indikator kinerja utama (IKU) Satpol PP dalam satu tahun anggaran 2024 yang merupakan indikator sasaran strategis yang terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada Rencana Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026. IKU Satpol PP berkaitan langsung dengan misi yang ada dalam RPD Kota Bekasi 2024 – 2026 maupun sasaran yang ada pada Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Satpol PP yang pertama adalah meningkatkan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada;
2. Indikator kinerja utama Satpol PP yang kedua adalah Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat prosentase jumlah perda atau perkada yang telah di tegakkan yang akan disandingkan dengan data jumlah keseluruhan perda dan perkada pada Kota Bekasi yang memuat sanksi;

3. Indikator kinerja utama Satpol PP yang ketiga adalah Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan. Indikator ini dipergunakan untuk melihat anggota satlinmas dalam penanganan bencana guna mengurangi, memperkecil akibat serta ikut memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat;
4. Indikator kinerja utama Satpol PP yang keempat adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Satpol PP yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Indikator kinerja utama Satpol PP yang kelima adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Indikator ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Satpol PP yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Penetapan kelima sasaran strategis dan indikator kinerja utama Satpol PP tersebut untuk menunjang pencapaian RPD Kota Bekasi 2024 – 2026 yaitu meningkatnya Ketertiban Masyarakat yang di Dukong Oleh Kohesi Sosial yang Kuat.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Satpol PP pada Tahun 2024 dimana sasaran pertama “Meningkatnya ketertiban masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat” dengan indikator:

1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sebesar 100 persen;
2. Persentase penegakan pelanggaran perda sebesar 100 persen;
3. Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan dengan perbandingan rasio 1 : 31;

Sasaran kedua “Meningkatkan Kualitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja” dengan indikator:



1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2024 sebesar 64,26 nilai B;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat capaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 sebesar 89,42 dengan mutu pelayanan: “A” dan kinerja pelayanan “Sangat Baik”.

Satpol PP harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2024, maupun terhadap peningkatan target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2025.

Adapun rincian kinerja yang harus ditingkatkan pada tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar 64,26 persen sehingga perlu adanya upaya perbaikan dalam peningkatan kinerja akuntabilitas kinerja, maka upaya yang akan dilakukan oleh Satpol PP di tahun 2024 adalah:
  - a. Memastikan dokumen perencanaan dari mulai RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja konsisten dijabarkan dalam dokumen penganggaran seperti APBD. Adapun upaya yang dilakukan adalah penyelesaian program dan kegiatan perencanaan di berbagai lingkup bidang pada Satpol PP, serta penyelarasan dalam penyusunan KUA/KUPA-PPAS;
  - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan secara triwulanan untuk memastikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja dapat dilaksanakan dan kendala yang dihadapi dapat diselesaikan;
  - c. Satpol PP memastikan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dan capaian meningkat dibanding tahun 2024.

2. Untuk indikator persentase hasil penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2023 dan 2024 terpantau penurunan sebanyak 4 persen dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa masih tingginya angka pelanggaran Perda dan Perkada di Kota Bekasi;

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Satpol PP pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami uraikan lebih lanjut pada BAB III Akuntabilitas Kinerja pada LKIP Satpol PP Tahun 2024 ini.

## **1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Satpol PP Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan satuan polisi pamong praja yang berperan penting dalam salah satu pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya apda dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintah umum, dan aspek pembinaan aparatur satuan polisi pamong praja.

Satuan polisi pamong praja Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk kemudian juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut

diperlukan perencanaan yang baik dan terukur.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh Sekretaris Satpol PP yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian, juga keuangan dan didukung oleh 4 (empat) bidang yaitu: (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya; (3) Bidang Perlindungan Masyarakat; serta (4) Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

### **1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS**

#### **A. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Kota Bekasi yang memiliki luas 210,49 km<sup>2</sup> terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam hal tersebut, Satpol PP berperan penting dalam mewujudkan Kota Bekasi tertib dan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal.

#### **B. ISU STRATEGIS**

Berikut adalah isu-isu strategis terkait satuan polisi pamong praja

dalam penegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1. Masih tingginya angka kriminalitas di kota bekasi

Berdasarkan data angka kriminal Kota Bekasi pada tahun 2024, terdapat 5.202 kasus kriminal yang didapat dari laporan hasil operasi Bekasi Kota. Dari tahun ke tahun angka kriminal makin meningkat, bila dilihat dari perbandingan angka kriminal pada tahun 2023 terdapat 2364 kasus. Capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran terbilang makin besar angka kriminalitas di Kota Bekasi pada 2 (dua) tahun terakhir. Sumber ini didapat langsung dari Kepala Bagian Operasi Polres Bekasi Kota.

2. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2024, angka pelanggaran perda mencapai 406 pelanggaran yang didapat dari laporan bidang penegakan perda/perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi terjadi naik turun, meskipun begitu akhir tahun 2023 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi lebih kecil dibandingkan di tahun 2024. Pada tahun 2023 jumlah pelanggaran sebanyak 164 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Sumber data dari bidang penegakan Perda Kota Bekasi.

3. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada

Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

4. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
6. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;  
Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi, rawan menimbulkan gejolak sosial akan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

#### **1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Kegiatan dilaksanakan Satpol PP pada tahun 2024 dengan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2024 adalah sebanyak 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan yang terdiri dari:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, diantaranya:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- B. Program Peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan, diantaranya:
1. Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan – kegiatan tersebut dilaksanakan Satpol PP dalam rangka menjalankan 3 (tiga) fungsi Satpol PP adalah Menegakkan Perda dan Perkada; Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Satpol PP yaitu:

1. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
2. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

3. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bina lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Dalam mencapai kinerja pelayanan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai penegakkan Perda dan Perkada, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan dukungan personil atau sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebanyak 680 orang pegawai dengan komposisi 196 orang ASN dan 484 orang Non ASN. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 1.4.1**  
**Jumlah Aparatur Satpol PP Kota Bekasi**

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	PNS	
	a. Jabatan Struktural	
	- Eselon II b	1
	- Eselon III a	1
	- Eselon III b	3
	- Eselon IV a	11
	b. Staf PNS	130
	c. Staf Fungsional	50
2.	TKK	484
	<b>Jumlah</b>	<b>680</b>

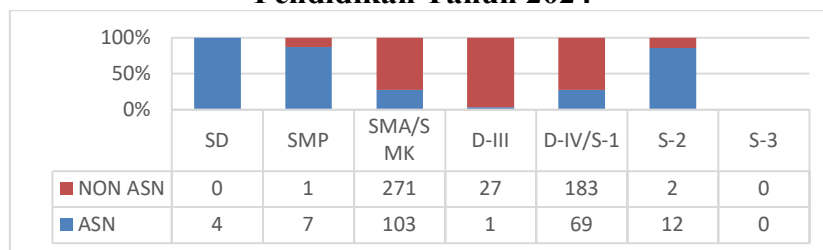
Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025



Apabila dilihat dari tabel diatas, berdasarkan jabatan paling banyak aparatur non ASN sekitar 60% dari total ASN.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTA/ sederajat sejumlah 374 orang atau 55%, S1 sejumlah 252 orang atau 37%, D III sejumlah 28 orang atau 34%, S2 sebanyak 14 orang atau 2 %, SLTP sebanyak 8 orang atau 1%, serta SD sejumlah 4 orang atau 1 % sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

**Tabel 1.4.2**  
**Jumlah Aparatur Satpol PP Kota Bekasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**



Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025

Secara kuantitas aparatur Satpol PP sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan terutama ahli dalam menganalisis dimana daerah rawan yang banyak melakukan pelanggaran perda/perkada.

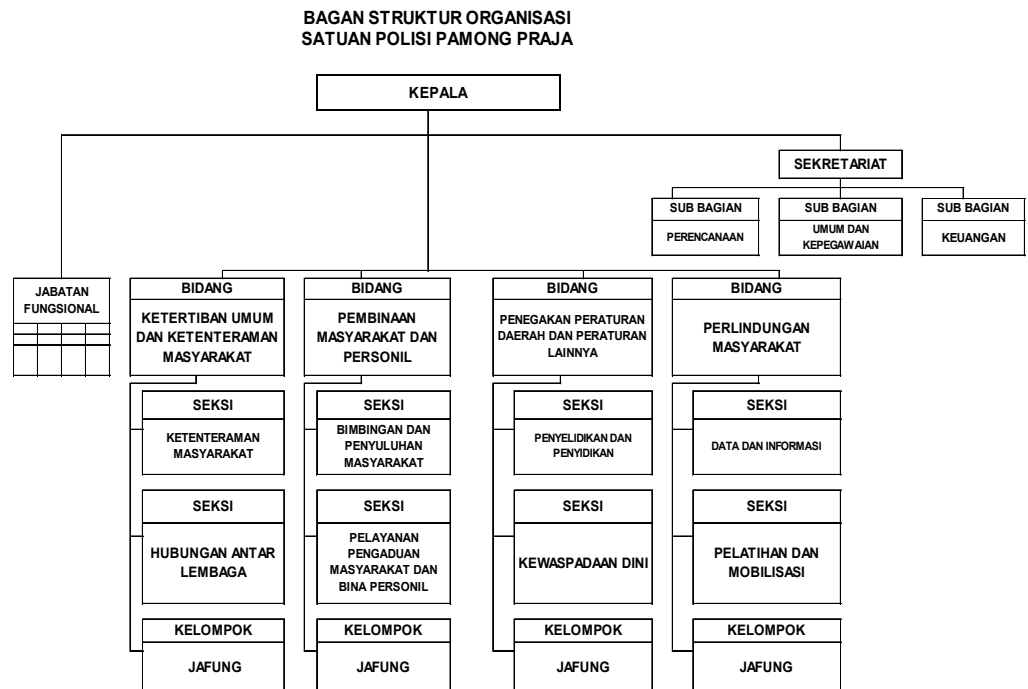
Susunan Organisasi Satpol PP Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
  1. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
  2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

- d. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:
  - 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
  - 2. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:
  - 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - 2. Seksi Kewaspadaan Dini.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
  - 1. Seksi Data dan Informasi;
  - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP



Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025

### 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

**BAB I       PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

**BAB II       PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA**

**1.3.1   Capaian Kinerja Organisasi**

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

**1.3.2   Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama**

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

1.3.2.1   Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

1.3.2.2   Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;

1.3.2.3   Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;

1.3.2.4   Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

1.3.2.5   Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

1.3.2.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

1.3.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

### 1.3.3 Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

### 1.3.4 Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2024.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkankinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja pada Satpol PP tahun 2024 didasarkan atas Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 serta Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Satpol PP Kota Bekasi tahun 2024. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja pada Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2024.

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan pada Renstra ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan perumusan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

Tujuan 1	Meningkatnya Kualitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Indikator tujuan 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tujuan 2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Indikator tujuan 2	Presentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada
--------------------	--

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2024-2026

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan 1 adalah:

<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja</b>
<b>Indikator Sasaran 1</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- b. Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>
<b>Indikator Sasaran 2</b>	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

	Prosentase penegakan perda
	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan

Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja seperti tergambar pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
I	Meningkatnya Kualitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (AKIP)	72,05	73,12	74,10
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	84,20	85,15	86,10
II	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100	100	100
			Prosentase penegakan perda	100	100	100
			Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	1 : 31	1 : 31	1 : 31

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.3**



**Formulasi Perhitungan IKU  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

FORMULASI PENGHITUNGAN IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB
				ALASAN	FORMULASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkannya kinerja penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan, Keindahan)	%	Sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 menyebutkan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat salah satu bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib, selanjutnya pasal 255 : Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertarikan, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka konsentrasi penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk X 100 %	SATPOL PP
		Prosentase penegakan pelanggaran perda	%	Sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 menyebutkan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat salah satu bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib, selanjutnya pasal 255 : Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertarikan, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka konsentrasi penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah	Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Saksi X 100 %	SATPOL PP

		Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	Satlinmas Organisasi yang di bentuk oleh pemerintah beranggotakan warga masyarakat yang di siapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi, memperkecil akibat serta ikut memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social masyarakat.	Jumlah 31 anggota Satlinmas perkelurahan	SATPOL PP
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu Instansi/Unit Kerja.Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu nilai dan peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) Perencanaan Kinerja (Bobot 30 %), (2) Pengukuran Kinerja (Bobot 30 %), (3) Laporan Kinerja (Bobot 15 %), dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25 %). Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (Nilai > 90-100), A (Nilai > 80-90), BB (Nilai >70-80), B (Nilai > 60-70), CC (Nilai >50-60), C (Nilai > 30-50), dan D (Nilai 0-30).	SATPOL PP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus ( Bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot / jumlah unsur) lalu perhitungan selanjutnya adalah ( Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang ) maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus ( SKM Pelayanan x 25 ). Mutu Pelayanan : A (Sangat Baik) (nilai 88,31 - 100,00), B (Baik) (76,61 - 88,30),C (Kurang Baik) (nilai 65,00 - 76,60), D (Tidak Baik) (nilai 25,00 - 64,99)	SATPOL PP

Ditinjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman” dengan sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah (1) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan (2) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut digambarkan alur pohon kinerja dari mulai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang terkait Satuan Polisi Pamong Praja sampai pada Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Gambar 2.2.1



**Tabel 2.2.1**  
**Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (AKIP)	Nilai	BB	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	AA	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	AA
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Peneyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Nilai	100	Triwulan I	-	
				Triwulan II	-	
				Triwulan III	-	
				Triwulan IV	100	
	Prosentase penegakan perda	%	100	Triwulan I	-	
				Triwulan II	-	
				Triwulan III	-	
				Triwulan IV	100	
	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1 : 31	Triwulan I	-	
				Triwulan II	-	
				Triwulan III	-	
				Triwulan IV	1 : 31	

**Tabel. 2.2.2**  
**Alokasi Anggaran 2024**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	96.701.462.570	APBD Kota Bekasi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
	SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		46.729.202.411	APBD Kota Bekasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000	APBD Kota Bekasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	APBD Kota Bekasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	APBD Kota Bekasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36.929.186.000	APBD Kota Bekasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36.919.186.000	APBD Kota Bekasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	APBD Kota Bekasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		104.174.000	APBD Kota Bekasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	104.174.000	APBD Kota Bekasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.066.753.000	APBD Kota

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
			Bekasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000	APBD Kota Bekasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302.832.000	APBD Kota Bekasi
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000	APBD Kota Bekasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30.000.000	APBD Kota Bekasi
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	APBD Kota Bekasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.000.000	APBD Kota Bekasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.175.251	APBD Kota Bekasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.784.432.160	APBD Kota Bekasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	950.000.000	APBD Kota Bekasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.834.432.160	APBD Kota Bekasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.588.482.000	APBD Kota Bekasi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	385.000.000	APBD Kota Bekasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000	APBD Kota Bekasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10.000.000	APBD Kota Bekasi
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50.000.000	APBD Kota Bekasi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.000.000	APBD Kota Bekasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	443.782.000	APBD Kota Bekasi
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		49.972.260.159	APBD Kota Bekasi
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		49.221.475.159	APBD Kota Bekasi
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	550.000.000	APBD Kota Bekasi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.391.000.000	APBD Kota Bekasi
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	600.000.000	APBD Kota Bekasi
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.909.707.080	APBD Kota Bekasi
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	7.031.496.000	APBD Kota Bekasi
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24.214.142.080	APBD Kota Bekasi



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	137.093.250	APBD Kota Bekasi
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	388.036.749	APBD Kota Bekasi
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		750.785.000	APBD Kota Bekasi
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	147.350.000	APBD Kota Bekasi
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	162.450.000	APBD Kota Bekasi
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	440.985.000	APBD Kota Bekasi

Sumber : SIPD tahun 2024, diolah

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dilaksanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja yang telah dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2024-2026.

Meninjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan daerah “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman” dengan indikator tujuan adalah Presentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada. Adapun sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat” dengan indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tersebut, maka indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah (1) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (2) Persentase Penegakan Pelanggaran Perda; (3) Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan (4) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**  
**Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	A	A	Tercapai
		Nilai AKIP	Nilai	BB	B	Belum Tercapai
		SPM	%	60%	56,90%	Tercapai (semakin berkurang semakin baik)
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%
		Prosentase penegakan perda	%	100%	100%	100%
		Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1 : 31	1 : 31	1 : 31

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2024*

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Sasaran Strategis I : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

#### 1. Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada

Indikator      Persentase      Penurunan      Tingkat

Pelanggaran Perda dan Perkada ditetapkan sebagai indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman adalah dengan adanya penurunan jumlah pelanggaran ketenteraman dan ketertiban. Indikator ini juga untuk menunjang Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada RPD 2024-2026.

Untuk mengukur Persentase indikator tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Keamanan dan ketertiban penting untuk mewujudkan kota yang kondusif sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman saat beraktivitas.

Capaian Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2024 diperoleh realisasi 100 persen dari target sebesar 100 persen.

Capaian target indikator Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.1**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100	100	100%

*Sumber: Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diolah, 2024.*

Dengan melihat tabel di atas, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2024 melampaui target yang diharapkan. Sejalan dengan perubahan indikator Kinerja Utama maka terdapat pula perubahan penggunaan data sumber untuk variabel penghitungan sehingga secara pelaporan LKIP Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan laporan LKIP Tahun sebelumnya yaitu 2023.

Adapun rincian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.2**  
**Jumlah Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban**

No	Kejadian	Tahun	
		2023	2024
1.	Pembunuhan	2	5
2.	Aniaya Berat	65	54
3.	Pencurian Berat	199	917
4.	Pencurian Keras	15	14
5.	Pencurian Roda 2	304	190
6.	Pencurian Roda 4	6	7
7.	Pemerasan Dan Ancaman	54	114
8.	Kebakaran	13	1
9.	Perjudian	5	7
10.	Perkosaan	4	2
11.	Narkotika	523	559
12.	Penggelapan	120	363
13.	Penipuan	484	1162
14.	Pengrusakan	8	34
15.	Pembakaran	0	5
16.	Pengroyokan	44	173
17.	Penadahan	6	27
18.	Curi Biasa	103	183
19.	Cabul/Zina/Asusila	72	43
20.	Perbuatan Tidak Senang	16	54

No	Kejadian	Tahun	
		2023	2024
21.	Penyerobotan Tanah	8	6
22.	Pemalsuan Surat/Ket Palsu	11	42
23.	Fitnah	6	15
24.	Penghinaan	1	14
25.	Pencemaran Nama Baik	9	42
26.	Aniaya Ringan	42	294
27.	Senjata Tajam	76	62
28.	Kejahatan Dalam Rumah Tangga	56	206
29.	Pelanggaran Hak Cipta	0	0
30.	Penculikan	1	0
31.	Kejadian Lain-Lain	111	607
<b>Jumlah</b>		<b>2.364</b>	<b>5.202</b>

*Sumber: Polres Kota Bekasi, 2024*

Adapun faktor penentu keberhasilan pencapaian target indikator Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diantaranya:

1. Komitmen Pimpinan untuk dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
3. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
4. Terobosan dan Inovasi dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum.

Pencapaian Indikator Prosentas Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada didukung oleh Indikator Program pada beberapa perangkat Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.3**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan**  
**Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan	Rasio	1:31	1:31
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100
3	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	%	100	100

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2024*

Dengan melihat capaian indikator program yang mendukung Pencapaian Indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja, dimana ketiga indikator tercapai.

Dimana pada indikator Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan anggota satlinmas setiap kelurahan beranggotakan 31 orang sehingga total jumlah anggota satlinmas se-wilayah Kota Bekasi sebanyak 1746 anggota tercapai.

Sedangkan pada indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) tercapai sebanyak 100% dimana setiap ada pelanggaran yang terjadi di wilayah kota bekasi telah ditindak lanjut baik dalam pembinaan, penyuluhan sampai dengan penindakan pada tahun 2024.

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Tahun 2023 dan 2024 tidak dapat dilakukan mengingat terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama yang berpengaruh terhadap perbedaan sumber data variabel penghitungan yang digunakan.

Adapun capaian kinerja tahun 2024 dengan menggunakan indikator prosentase penurunan tingkat pelanggaran perda dan perkada dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.2.4**  
**Analisis Capaian Nilai Indikator Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Presentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	100	100	100			
Setelah Penyesuaian Tupoksi								
1.	Presentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada					100	100	100

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.5**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	
		2023	2024
<b>Target</b>	%	100	100
<b>Realisasi</b>	%	100	100

*Sumber: Diolah, 2024.*

Dengan melihat tabel tersebut di atas, untuk mencapai target akhir tahun Renstra, di mana pada tahun 2024 baru mencapai 100 persen, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sudah mencapai target sebesar poin.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKK yang meningkat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Rancangan Strategis terkait perubahan nomenklatur dan kodifikasi dalam mendukung capaian indikator sasaran.
2. Optimalisasi anggaran.
3. Peningkatan sarana dan prasarana.
4. Peningkatan kualitas pendataan dan evaluasi.
5. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Prosentase Penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.6**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	96.701.462.570	89.003.611.267	100	92,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		46.729.202.411	43.364.410.324	100	92,80

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000	44.999.200	100	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	34.999.500	100	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.999.700	100	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36.929.186.000	34.392.978.615	100	93,13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36.919.186.000	34.390.443.615	100	93,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	2.535.000	100	25,35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		104.174.000	94.557.000	100	90,77
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	104.174.000	94.557.000	100	90,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.066.753.000	753.075.325	100	70,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000	74.698.000	100	99,60
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302.832.000	296.896.500	100	8,04

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000	26.020.000	100	31,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30.000.000	30.000.000	100	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	67.837.000	100	67,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.000.000	257.623.825	100	54,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.175.251	202.715.000	100	95,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.784.432.160	5.494.598.298	100	94,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	950.000.000	894.633.052	100	94,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.834.432.160	4.599.965.246	100	95,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.588.482.000	2.381.486.886	100	92,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	385.000.000	277.413.993	100	72,06

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000	1.411.713.200	100	94,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10.000.000	9.670.000	100	96,70
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50.000.000	48.360.000	100	96,72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.000.000	195.057.000	100	97,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	443.782.000	439.272.693	100	98,98
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		49.972.260.159	45.639.200.943	100	91,33
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		49.221.475.159	44.914.229.043	100	91,25
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	550.000.000	446.351.338	100	81,15
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.391.000.000	13.895.158.300	100	96,55

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	600.000.000	591.160.000	100	98,53
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.909.707.080	1.441.594.730	100	75,49
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	7.031.496.000	5.005.631.000	100	71,19
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24.214.142.080	23.183.243.675	100	95,74
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	137.093.250	-	100	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	388.036.749	351.090.000	100	90,48
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		750.785.000	724.971.900	100	96,56
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	147.350.000	144.749.900	100	98,24
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	162.450.000	155.623.000	100	95,80
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	440.985.000	424.599.000	100	96,28

*Sumber : Data Realisasi Anggaran tahun 2024, diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dimana pagu anggaran sebesar 96.701.462.570,- (*Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.003.611.267,- (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*). dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Penurunan Jumlah Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada hanya mencapai 91,33 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja

tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Hal tersebut disebabkan karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran strategis Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 yaitu :

1. Optimalisasi sumber daya manusia berupa optimaliasi kinerja petugas di lapangan;
2. Peningkatan koordinasi internal dan eksternal.

Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicatorsasaran strategis Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel.3.2.7**  
**Jumlah personil yang mendukung pencapaian indicator**  
**sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran**  
**Perda dan Perkada**

No	Bidang	Jumlah Personil	
		ASN	Non ASN
1	Bidang Trantibumas	130	435
2	Bidang Penegakan Perda	11	12
3	Bidang Pembinaan	26	4
4	Bidang Linmas	13	6

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja**

**1. Nilai AKIP**

Indikator pencapaian nilai AKIP ditetapkan sebagai indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk mengukur sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan



anggaran dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Indikator ini juga untuk menunjang Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada RPD 2024-2026.

Pengukuran nilai AKIP pada Setiap Instansi Pemerintah adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun pedoman pengukuran pencapaian nilai indikator tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Evaluasi terhadap capaian nilai AKIP meliputi penilaian terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Hasil Kinerja.

Capaian nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2024 diperoleh nilai B dari target nilai BB. Dengan demikian capaian kinerja indikator pencapaian nilai AKIP sebesar “B” belum tercapai yang di targetkan. Adapun capaian target indikator nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.8**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Pencapaian Nilai AKIP	Persen	BB	B	Belum tercapai

*Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Satpol PP Kota Bekasi, 2024.*

Dengan melihat tabel di atas, maka jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2024 belum mampu melampaui target nilai BB pada pencapaian nilai AKIP, adapun pencapaian nilai AKIP tahun 2024 dengan nilai B merupakan tingkat akuntabilitas kinerja yang menunjukkan tingkat efektivitas dan Efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Adapun Akumulasi Rincian Penilaian terhadap komponen-komponen yang dinilai sehingga dapat menghasilkan tingkat akuntabilitas kinerja BB berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP SKPD nomor 700.1.2.1/060-LHE/ITKO.Set tanggal 04 Juli 2024 UPD Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2.9**  
**Rincian Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan Polisi**  
**Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024**

No	Komponen Yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,95
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,58
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,48
d.	Evaluasi Kinerja	25	14,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,26
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

*Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP SKPD  
Nomor 700.1.2.1/060-LHE/ITKO.Set UPD Tahun 2024*

Dan bila dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2023 terdapat penurunan nilai terhadap beberapa komponen yang dinilai di Tahun 2024 . Adapun perbandingan komponen yang dinilai pada tahun 2023 dengan 2024 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2.10**  
**Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Satuan**  
**Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024**

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun	
		2023	2024
1.	Perencana Kinerja	20,29	19,95
2.	Pengukuran Kinerja	20,48	20,58
3.	Pelaporan Kinerja	10,61	9,48
4.	Evaluasi Kinerja	17,05	14,25
	Nilai Hasil Evaluasi	70,43	64,26
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	B

*Sumber: Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2024*

Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mempertahankan pencapaian nilai AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diantaranya perlu adanya Perbaikan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Dalam hal tersebut, perlu langkah-langkah yang perlu diupayakan dalam meningkatkan penilaian AKIP pada tahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Lebih kesiapan dalam penyajian dokumen perencanaan kinerja dan selalu melakukan evaluasi setiap dokumennya agar mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Melakukan pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Terdapat dokumen laporan kinerja yang telah memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja,

informasi keberhasilan/kegagalan/kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya dan telah memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Melakukan evaluasi kinerja internal secara berjenjang sehingga memberikan kesan yang (nyata) dampak dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Pencapaian nilai AKIP didukung oleh Indikator Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai berikut:

**Tabel 3.2.11**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai AKIP**

No	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Prosentase Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100 %
2	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
3	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
4	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
5	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %
6	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2024

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Pencapaian Nilai AKIP Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.12**  
**Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai AKIP**  
**Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai AKIP	%	B	B	B	BB	B	Belum Tercapai

Dilihat dari tabel diatas capaian Indikator Pencapaian Nilai AKIP pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Indikator Pencapaian Nilai AKIP pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang menurun. Hal tersebut tentunya menjadi penyemangat bagi Kota Bekasi untuk meningkatkan terus kinerja pencapaian nilai AKIP untuk kedepannya.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pencapaian Nilai AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2.14**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator**  
**Kinerja Utama pencapaian Nilai AKIP**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	96.701.462.570	89.003.611.267	100	92,04

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		46.729.202.411	43.364.410.324	100	92,80
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000	44.999.200	100	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	34.999.500	100	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.999.700	100	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36.929.186.000	34.392.978.615	100	93,13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36.919.186.000	34.390.443.615	100	93,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	2.535.000	100	25,35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		104.174.000	94.557.000	100	90,77
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	104.174.000	94.557.000	100	90,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.066.753.000	753.075.325	100	70,60

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000	74.698.000	100	99,60
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302.832.000	296.896.500	100	8,04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000	26.020.000	100	31,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30.000.000	30.000.000	100	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	67.837.000	100	67,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.000.000	257.623.825	100	54,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.175.251	202.715.000	100	95,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.784.432.160	5.494.598.298	100	94,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	950.000.000	894.633.052	100	94,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.834.432.160	4.599.965.246	100	95,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.588.482.000	2.381.486.886	100	92,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	385.000.000	277.413.993	100	72,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000	1.411.713.200	100	94,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10.000.000	9.670.000	100	96,70
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50.000.000	48.360.000	100	96,72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.000.000	195.057.000	100	97,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	443.782.000	439.272.693	100	98,98
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		49.972.260.159	45.639.200.943	100	91,33
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		49.221.475.159	44.914.229.043	100	91,25
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	550.000.000	446.351.338	100	81,15



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.391.000.000	13.895.158.300	100	96,55
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	600.000.000	591.160.000	100	98,53
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.909.707.080	1.441.594.730	100	75,49
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	7.031.496.000	5.005.631.000	100	71,19
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24.214.142.080	23.183.243.675	100	95,74

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	137.093.250	-	100	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	388.036.749	351.090.000	100	90,48
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		750.785.000	724.971.900	100	96,56
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	147.350.000	144.749.900	100	98,24
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	162.450.000	155.623.000	100	95,80
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	440.985.000	424.599.000	100	96,28

sumber : Data Realisasi Anggaran tahun 2024, diolah

Jumlah personil yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis pencapaian Nilai AKIP di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.2.15**  
**Jumlah personil yang mendukung pencapaian indikator Sasaran strategis pencapaian Nilai AKIP**

No	Bidang	Jumlah Personil	
		ASN	Non ASN
1	Bidang Sekretariat	12	30

## 2. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut dilakukan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat dimana pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) itu sendiri memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan

antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 6 (jenis) jenis layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu:

1. Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh anggota Satlinmas
2. Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa
3. Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin
4. Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK
5. Pelayanan Penertiban PMKS
6. Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh Anggota Satlinmas

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.16**

**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Pencapaian Nilai IKM	Persen	84,20	89,42	Tercapai

Sumber: Perkin KasatpolPP, 2024.

Dengan melihat tabel di atas, maka jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2024 telah mampu mencapai target nilai A sebesar target 89,42 poin, pada pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), adapun pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 dengan nilai A, yaitu sebesar 86,79 poin, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Tercapai.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. pada Unit pelayanan Satpol PP Kota Bekasi diperoleh dari data Survey terhadap 464 responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparat Satpol PP. Survey dilakukan pada Semester 1 Tahun 2023, responden diminta memberikan penilaian terhadap 6 unsur pelayanan dan hasil pengisian kuesioner direkap untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Adapun jenis pelayanan yang disurvei adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh Anggota Satlinmas
2. Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa
3. Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin di atas Tanah Negara
4. Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK
5. Pelayanan Penertiban PMKS;
6. Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh Anggota Satlinmas

Adapun data hasil capaian penilaian IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat terlihat pada Rekapitulasi nilai tiap unsur pelayanan dari 464 orang responden berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner dengan nilai rata-rata perunsur pelayanan seperti tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.17**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan**  
**Penanganan Unjuk Rasa pada Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3,663
2	PROSEDUR	3,642
3	WAKTU PELAYANAN	3,579
4	BIAYA/TARIF	3,623
5	PRODUK PELAYANAN	3,570
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,550
7	PERILAKU PELAKSANA	3,566
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,377
9	SARANA DAN PRASARANA	3,505
	IKM Jenis Layanan	89,10

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2024, diolah

**Tabel 3.2.18**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3,670
2	PROSEDUR	3,623
3	WAKTU PELAYANAN	3,605
4	BIAYA/TARIF	3,492
5	PRODUK PELAYANAN	3,469
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,507
7	PERILAKU PELAKSANA	3,596
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,522
9	SARANA DAN PRASARANA	3,475
	IKM Jenis Layanan	88,78

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2024, diolah

**Tabel 3.2.19**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK pada Satuan Polisi PamongPraja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3,791
2	PROSEDUR	3,804
3	WAKTU PELAYANAN	3,686
4	BIAYA/TARIF	3,734
5	PRODUK PELAYANAN	3,560
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,414
7	PERILAKU PELAKSANA	3,488
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,614
9	SARANA DAN PRASARANA	3,469
	IKM Jenis Layanan	90,44

*Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2024, diolah*

**Tabel 3.2.20**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penertiban PMKS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3,728
2	PROSEDUR	3,789
3	WAKTU PELAYANAN	3,692
4	BIAYA/TARIF	3,534
5	PRODUK PELAYANAN	3,519
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,447
7	PERILAKU PELAKSANA	3,581
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,582

9	SARANA DAN PRASARANA	3,550
	IKM Jenis Layanan	90,06

Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2024, diolah

**Tabel 3.2.21**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh anggota Satlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3,652
2	PROSEDUR	3,394
3	WAKTU PELAYANAN	3,477
4	BIAYA/TARIF	4,000
5	PRODUK PELAYANAN	3,576
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,598
7	PERILAKU PELAKSANA	3,432
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,871
9	SARANA DAN PRASARANA	3,871
	IKM Jenis Layanan	91,31

**Tabel 3.2.22**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh Anggota Satlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	PERSYARATAN	3,594
2	PROSEDUR	3,689
3	WAKTU PELAYANAN	3,583
4	BIAYA/TARIF	3,661
5	PRODUK PELAYANAN	3,388



6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,484
7	PERILAKU PELAKSANA	3,510
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,512
9	SARANA DAN PRASARANA	3,528
	IKM Jenis Layanan	88,75

sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2024, diolah

Dari hasil analisis terhadap rekapitulasi survey kepuasan masyarakat pada 6 jenis pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, dapat terlihat pada tabel yang disajikan berikut ini :

**Tabel 3.2.23**  
**Hasil Analisis perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

NO	KARAKTER- ISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	262	56%
		PEREMPUAN	202	44%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	18	4%
		SLTA	367	79%
		DI/DII	0	0%
		DIII	22	5%
		SI	56	12%
		S2	1	0%
3	PEKERJAAN	S3	0	0%
		PNS	7	2%
		SWASTA	77	17%
		WIRAUSAHA	22	5%

NO	KARAKTER-ISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
		LAINNYA	358	77%
4	JENIS LAYANAN	PELAYANAN PENANGANAN UNJUK RASA	236	51%
		PELAYANAN PERBANTUAN TRANTIBUMLIN MAS OLEH ANGGOTA SATLINMAS	29	6%
		PELAYANAN PENERTIBAN THPP, MIRAS DAN PSK	56	12%
		PELAYANAN PENERTIBAN PMKS	110	24%
		PELAYANAN PENERTIBAN BANGUNAN TIDAK BERIZIN DI TANAH NEGARA	31	7%
		PELAYANAN PENANGANAN UNJUK RASA	20	4%

*Sumber : Data Laporan SKM Satpol PP tahun 2024*

Adapun rincian jenis layanan serta unsur penilaian dalam pengukuran IKM Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 dan 2024 ada peningkatan sebanyak 2,63 % sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2.24**  
**Perbandingan Hasil Penilaian Komponen SKM Satuan Polisi**  
**Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2023**

No	Unsur Pelayanan	Tahun	
		2023	2024
1.	Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa	87,28	89,10
2.	Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin	85,65	88,78
3.	Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK	88,51	90,44
4.	Pelayanan Penertiban PMKS	87,11	90,06
5.	Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh Anggota Satlinmas	87,26	91,31
6.	Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh Anggota Satlinmas	85,13	88,75
	<b>Nilai Rata Rata</b>	<b>86,79</b>	<b>89,42</b>
	<b>Kategori penilaian</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

*Sumber: Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2024*

Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mempertahankan pencapaian nilai IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diantaranya:

1. Unsur Produk;
2. Sarana dan Prasarana;
3. Dan unsur Perilaku.

**Tabel 3.2.25**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program terhadap**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian Nilai IKM**

No	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Prosentase Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100 %
2	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
3	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100 %
4	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	100 %

5	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %
6	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2024

Dengan melihat 6 (enam) capaian indikator program yang mendukung capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja, dimana keenam indikator tercapai maka sangat wajar apabila capaian kinerja Pencapaian Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2024 adalah ,yaitu dengan capaian Pencapaian Nilai IKM dengan tingkat akuntabilitas “A” dari target yang direncanakan “A”. Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.26**  
**Analisis Capaian Nilai Indikator Pencapaian Nilai IKM**  
**Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai IKM	%	A	A	Terpenuhi	84,20 (A)	89,42 (A)	Terpenuhi

Dilihat dari tabel diatas capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Indikator Pencapaian Nilai IKM pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik yakni mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja di kategori A. Hal tersebut tentunya menjadi penyemangat bagi Kota Bekasi untuk meningkatkan terus kinerja pencapaian nilai IKM untuk kedepannya.

Untuk Capaian Pencapaian Nilai IKM Tahun 2024 tersebut, jika dikaitkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.27**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja**  
**Utama Pencapaian Nilai IKM Terhadap Target**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	
		2023	2024
<b>Target</b>	%	A	A
<b>Realisasi</b>	%	A	A

*Sumber: Diolah, 2024.*

Dengan melihat tabel tersebut di atas, untuk mencapai target akhir tahun Renstra pada Pencapaian Nilai IKM “A”, di mana pada tahun 2023 telah mencapai hasil A, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sudah mencapai target nilai A dengan capaian A yang menjadi sebagai pemicu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam mempertahankan nilai tersebut di tahun berikutnya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Pencapaian Nilai IKM di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas baik dalam pengambilan keputusan, dari pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik;
2. Meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pencapaian Nilai IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.28**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan**  
**Perkada**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	96.701.462.570	89.003.611.267	100	92,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		46.729.202.411	43.364.410.324	100	92,80
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000	44.999.200	100	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	34.999.500	100	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.999.700	100	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36.929.186.000	34.392.978.615	100	93,13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36.919.186.000	34.390.443.615	100	93,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	2.535.000	100	25,35

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		104.174.000	94.557.000	100	90,77
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	104.174.000	94.557.000	100	90,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.066.753.000	753.075.325	100	70,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000	74.698.000	100	99,60
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302.832.000	296.896.500	100	8,04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000	26.020.000	100	31,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30.000.000	30.000.000	100	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	67.837.000	100	67,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.000.000	257.623.825	100	54,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.175.251	202.715.000	100	95,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.784.432.160	5.494.598.298	100	94,99

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	950.000.000	894.633.052	100	94,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.834.432.160	4.599.965.246	100	95,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.588.482.000	2.381.486.886	100	92,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	385.000.000	277.413.993	100	72,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000	1.411.713.200	100	94,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10.000.000	9.670.000	100	96,70
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50.000.000	48.360.000	100	96,72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.000.000	195.057.000	100	97,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	443.782.000	439.272.693	100	98,98



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		49.972.260.159	45.639.200.943	100	91,33
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		49.221.475.159	44.914.229.043	100	91,25
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	550.000.000	446.351.338	100	81,15
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.391.000.000	13.895.158.300	100	96,55
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	600.000.000	591.160.000	100	98,53
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.909.707.080	1.441.594.730	100	75,49

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	7.031.496.000	5.005.631.000	100	71,19
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24.214.142.080	23.183.243.675	100	95,74
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	137.093.250	-	100	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	388.036.749	351.090.000	100	90,48
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		750.785.000	724.971.900	100	96,56
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	147.350.000	144.749.900	100	98,24

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Rp	Fisik (%)
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	162.450.000	155.623.000	100	95,80
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	440.985.000	424.599.000	100	96,28

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Jumlah personil yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis capaian Nilai IKM di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel.3.2.29**  
**Jumlah personil yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada**

No	Bidang	Jumlah Personil	
		ASN	Non ASN
1	Bidang Trantibumas	173	452
2	Bidang Penegakan Perda	14	12
3	Bidang Pembinaan	9	4
4	Bidang Linmas	7	7

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui program dan kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut, Total

anggaran pelayanan dasar untuk Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 96.701.462.570 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.003.611.267,- (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*). Jika dibandingkan dengan APBD Kota Bekasi Tahun 2023 yaitu Rp. 92.817.098.905 (*Sembilan puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh depalan Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah*) maka alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 1,6%. Adapun rincian program dan kegiatan untuk pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.3.1**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran**  
**Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023		Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	92.817.098.905	84.907.857.434	91,48	96.701.462.570	89.003.611.267	92,04

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023		Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		73.246.314.655	68.177.373.904	93,08	46.729.202.411	43.364.410.324	92,80
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000.000	3.989.000	99,73	45.000.000	44.999.200	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.992.500	99,63	35.000.000	34.999.500	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.996.500	99,83	10.000.000	9.999.700	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		37.274.314.000	33.724.556.742	90,48	36.929.186.000	34.392.978.615	93,13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37.272.314.000	33.724.556.742	90,48	36.919.186.000	34.390.443.615	93,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.997.000	99,85	10.000.000	2.535.000	25,35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		500.000.000	477.180.000	95,44	104.174.000	94.557.000	90,77
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	500.000.000	477.180.000	95,44	104.174.000	94.557.000	90,77

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023		Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah		680.917.400	601.004.563	88,26	1.066.753.000	753.075.325	70,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75.000.000	70.056.000	93,41	75.000.000	74.698.000	99,60
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	316.996.400	296.852.663	93,65	302.832.000	296.896.500	98,04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	83.921.000	66.777.900	79,67	83.921.000	26.020.000	31,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	30.000.000	30.000.000	100	30.000.000	30.000.000	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	30.825.000	61,65	100.000.000	67.837.000	67,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	106.493.000	85,19	475.000.000	257.623.825	54,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	-	0	211.175.251	202.715.000	95,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		32.804.792.855	31.546.717.617	96,16	5.784.432.160	5.494.598.298	94,99

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023		Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	850.000.000	780.781.596	91,86	950.000.000	894.633.052	94,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	31.954.792.855	30.765.936.021	96,28	4.834.432.160	4.599.965.246	95,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.982.290.400	1.823.925.982	92,01	2.588.482.000	2.381.486.886	92,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	119.590.400	102.789.171	85,95	385.000.000	277.413.993	72,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.499.700.000	1.359.754.021	90,67	1.499.700.000	1.411.713.200	94,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	-	0	10.000.000	9.670.000	96,70
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	-	0	50.000.000	48.360.000	96,72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163.000.000	162.999.570	100	200.000.000	195.057.000	97,53

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023		Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200.000.000	198.383.220	99,19	443.782.000	439.272.693	98,98
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		19.570.784.250	16.730.483.530	85,49	49.972.260.159	45.639.200.943	91,33
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		18.965.819.250	16.161.856.980	85,22	49.221.475.159	44.914.229.043	91,25
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	146.430.000	144.198.000	98,48	550.000.000	446.351.338	81,15
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.209.612.050	13.546.897.900	89,07	14.391.000.000	13.895.158.300	96,55
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	475.070.000	464.710.000	97,82	600.000.000	591.160.000	98,53



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023		Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	706.770.800	532.329.080	75,32	1.909.707.080	1.441.594.730	75,49
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.347.078.000	818.042.000	60,73	7.031.496.000	5.005.631.000	71,19
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	542.804.400	398.758.000	73,46	24.214.142.080	23.183.243.675	95,74

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023		Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	105.000.000	-	0	137.093.250	-	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	433.054.000	256.922.000	59,33	388.036.749	351.090.000	90,48
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		430.785.000	414.606.550	96,24	750.785.000	724.971.900	96,56
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	147.350.000	145.740.000	98,91	147.350.000	144.749.900	98,24
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	162.450.000	148.982.500	91,71	162.450.000	155.623.000	95,80
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda/Perkada	120.985.000	119.884.050	99,09	440.985.000	424.599.000	96,28

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023		Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	
		Rp	Rp	Keu (%)	Rp	Rp	Keu (%)
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		174.180.000	154.020.000	88,43		-	-
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	174.180.000	154.020.000	88,43		-	-

*Sumber: Sub Bagian Keuangan 2024 ,diolah*

Penyerapan anggaran sebesar 92,04% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Satpol PP Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (*performance results*) Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2024 menggambarkan bahwa capaian kinerja selama tahun 2024 untuk sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja”, menunjukkan peningkatan pada nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Sedangkan pada indikator kinerja lainnya seperti nilai AKIP terjadi penurunan nilai administrasinya.

Capaian kinerja Satpol PP Kota Bekasi selama tahun 2024 untuk indikator kinerja pada sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”, menunjukkan pada indikator kinerja terkait tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dilihat dari hasil data laporan angka kriminalitas dan pelanggaran perda terbilang masih banyak daripada tahun kemarin. Namun penyelesaian pelanggarannya mencapai 100% (seratus persen). Dilihat dari analisis pencapaian indikator tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam penanganan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).

Pada capaian indikator kinerja terkait persentase penegakkan pelanggaran perda, bila dilihat dari data pada tahun 2023 dan tahun 2024 terjadi peningkatan pelanggaran. Namun penyelesaian pelanggaran perda terselesaikan mencapai 100% (seratus persen). Sedangkan capaian indikator kinerja rasio perlindungan masyarakat

tiap kelurahan dengan capaian perbandingan 1 : 31 yaitu setiap kelurahan beranggotakan sebanyak 31 (tiga puluh satu) anggota satlinmas telah terlaksana dengan dilatih kesempatan setiap anggota satlinmas.

Capaian kinerja Satpol PP Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Satpol PP Kota Bekasi tahun 2024-2026, serta Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 2 (sasaran strategis) dan 5 (lima) indikator kinerja utama dengan hasil sebagai berikut:

- a. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja utama mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
  1. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencapai target. Target pada tahun 2024 yaitu dengan nilai 84,20 sedangkan nilai yang Satpol PP peroleh yaitu dengan nilai 89,42 dan memenuhi target yang sudah ditetapkan pada Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
  2. Indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) mencapai 100 (seratus), dapat dipertahankan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 100 juga bila dilihat dari Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
  3. Indikator kinerja presentase penegakan perda mencapai 100 persen dalam penyelesaian penegakan perda, dapat dipertahankan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 100;
  4. Indikator kinerja rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan mencapai rasio 1:31, dapat dipertahankan capaiannya bila dibandingkan dengan tahun 2023.

b. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja utama yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum mencapai yang ditargetkan. Target pada tahun 2024 yaitu dengan nilai 72,05 sedangkan nilai yang Satpol PP peroleh yaitu dengan nilai 64,25. belum mencapai target, langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut di tahun yang akan datang dengan cara mengevaluasi, monitoring, menyiapkan serta menyajikan dokumen-dokumen yang menjadi Eviden dalam penilaian Akip tersebut.

Capaian kinerja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Renstra Tahun 2024-2026 dikategorikan baik.

Pencapaian target indikator kinerja Satpol PP Kota Bekasi juga didukung dengan adanya alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 96.701.462.570,- dengan realisasi sebesar Rp 89.003.611.267,-. Secara keseluruhan capaian realisasi fisik dan keuangan Satpol PP Kota Bekasi pada tahun 2024 dapat dikategorikan baik, dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 persen dan capaian realisasi keuangan sebesar 92,04 persen.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Renstra 2024-2026 khususnya Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Adapun faktor keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh:

1. Metode pengumpulan data dan informasi dari setiap bidang dan sekretariat dan adanya evaluasi dan monitoring setiap dokumen perencanaan yang dilakukan dibantu dengan menggunakan teknologi informasi atau digital sehingga informasi dan data yang diperoleh lebih cepat tersampaikan;

2. Komitmen tim seluruh bidang dan sekretariat dalam pelaksanaan rangkaian aktivitas dari sub kegiatan.

Pelaporan perencanaan dibantu juga dengan aplikasi pendukung seperti Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev), Sistem Informasi Data Pembangunan (sitabang), serta Sistem Pelaporan Pembangunan (Simpelbang). Dengan adanya aplikasi tersebut dapat memudahkan proses perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian *outcome* dan *output* kegiatan pada khususnya Satpol PP Kota Bekasi. Oleh karena itu, peran aplikasi tersebut sangat membantu meningkatkan kualitas pelaporan dalam memenuhi dokumen perencanaan.

#### **4.2 RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. Meningkatkan keselarasan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek sampai dengan kinerja individu, maka melakukan perbaikan terhadap dokumen Renstra, Renja, Cascading, Pohon Kinerja, Rencana Aksi, RKT, Perjanjian Kinerja, IKI dengan menyelaraskan seluruh tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator agar terdapat keselarasan antar seluruh dokumen perencanaan dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan pada Satpol PP:
  - a. Memperbaiki laporan dalam penyajian pengukuran kinerja pada (1) indikator kinerja rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan (2) indikator kinerja penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan);
  - b. Dapat menyajikan infografis yang memuat 7 (tujuh) informasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 800.1.11.1/6809/SETDA.Org tanggal 11 Desember 2024 Hal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Insyansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Perangkat Daerah;

- c. Diselaraskan capaian kinerja dan mangacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024-2026.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulan di samping tahunan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai aktivitas (Rencana Aksi) pada Satpol PP yang selanjutnya diturunkan pada evaluasi kinerja eselon II (Kepala Satuan), eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang), eselon IV (Kepala Sub Bagian), sampai pada Jabatan Fungsional dan pelaksana (staf) yang dituangkan dalam E-Kinerja dalam rangka mencapai kinerja organisasi Satpol PP;
3. Pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) berdasarkan capaian kinerja individu. Hal ini dilakukan misalnya pemberian penghargaan kepada staf pelaksana yang telah berkinerja baik dan sangat baik (ditunjukkan dalam E-Kinerja mencapai kinerja baik dan sangat baik) berupa pengembangan kompetensi dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dan atau mendapat kesempatan promosi karirnya.

Hal penting perlu peningkatan komitmen bersama untuk mereapkan SAKIP sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan di Satpol PP Kota Bekasi. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan LKIP perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data di dalam dokumen LKIP.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil



Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa-masa mendatang.

Bekasi, Januari 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Bekasi

Karto, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196704151986031005



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Pangeran Jayakarta No. 1 Harapan Mulya Satria Telp./Fax. 021 8945 6740  
**BEKASI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 500.14.3.1/Kep.03-Satpolpp.Set**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran pencapaian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan sasaran Strategis Jangka Menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024-2026, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6)
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 18);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Memperhatikan : 1. Surat Inspektorat Daerah Kota Bekasi tanggal 7 Januari 2025 tentang Reviu Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Perangkat Daerah

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
- KEDUA** : Susunan Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA BEKASI



KARTO

**Tembusan Yth :**

1. Plt.Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
 PRAJA KOTA BEKASI  
 NOMOR : 500.14.3.1/Kep.03-Satpolpp.Set  
 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
 TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKANN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
I	Pengarah	KARTO, S.IP, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
II	Ketua	Dra. AMSIYAH, M.Si	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
III	Sekretaris	ADI MULYADI, S.E., M.Si	Kasubag Perencanaan
IV	Koordinator Bidang		1. Kepala Bidang Tibumtranmas 2. Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah 3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil 4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
V	Anggota		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya
VI	Sekretariat	1. Abdul Munir, S.Ag., MM 2. Ahmad Maliki 3. Nur Vita Handayani 4. Suci Fitria Wulandari	



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
 PRAJA KOTA BEKASI

KARTO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
 PRAJA KOTA BEKASI  
 NOMOR: 500.14.3.1/Kep.03-Satpolpp.Set  
 TENTANG URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN  
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 (LKIP) TAHUN 2025  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja
2	Ketua	Mengkoordinasikan, mengkaji, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025
3	Sekretaris	Memfasilitasi, menyiapkan bahan dan kelengkapan dokumen telaahan dan administrasi dalam penyusunan materi dan laporan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025
4	Anggota	a. Mengumpulkan bahan-bahan dan mengolah data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2025
		b. Mengidentifikasi dan menganalisa data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2024
		c. Mendokumentasikan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Tahun 2024

Ditetapkan di Bekasi pada  
 Tanggal 03 Januari 2025  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kota Bekasi

